

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dari Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Analisis varians pendapatan daerah Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang kurang baik.
2. Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam membiayai pembangunan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih tinggi dan otonomi fiskal belum sepenuhnya tercapai.
3. Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan pola hubungan instruktif, yang berarti peran pemerintah pusat masih dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kemandirian fiskal belum terwujud secara optimal.
4. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa capaian penerimaan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan tergolong sangat efektif, meskipun nilainya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah cukup baik dalam merealisasikan target PAD yang ditetapkan.
5. Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan bahwa belanja daerah sudah tergolong efisien karena mampu merealisasikan kegiatan dengan

penggunaan anggaran yang relatif hemat, meskipun ada program/kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana.

6. Rasio Belanja Modal dan Belanja Operasi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pada belanja operasi dan penurunan pada belanja modal. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah lebih fokus pada pengeluaran rutin daripada investasi pembangunan.
7. Rasio SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) menunjukkan nilai positif dari tahun ke tahun, yang menandakan adanya dana yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam satu tahun anggaran. Namun, pertumbuhan SiLPA cukup fluktuatif, yang menunjukkan kurang optimalnya perencanaan anggaran.
8. Rasio Pembiayaan Daerah menunjukkan bahwa selama periode penelitian, pengeluaran pembiayaan hanya digunakan untuk penyertaan modal daerah yang nilainya tetap setiap tahun. Ini mencerminkan penggunaan pembiayaan yang konservatif namun belum optimal untuk menunjang pembangunan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, pemerintah daerah harus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan memperluas basis pajak dan retribusi daerah.

2. Optimalisasi Belanja Modal: Pemerintah daerah disarankan untuk menyeimbangkan alokasi belanja antara belanja operasi dan belanja modal guna meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
3. Perencanaan dan Penganggaran yang Lebih Tepat: Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan penganggaran agar SiLPA dapat diminimalkan dan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan prioritas.
4. Pemanfaatan Pembiayaan yang Efisien: Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan seperti pinjaman daerah atau obligasi daerah secara hati-hati untuk mendorong pembangunan strategis yang belum bisa didanai dari PAD maupun dana transfer.
5. Peningkatan Kapasitas SDM: Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan sangat penting agar kebijakan fiskal daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.